

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan penyelenggara urusan pemerintah oleh pemda dan DPRD menurut asas otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melaksanakan pembangunan sesuai kehendak dan kepentingan masyarakat serta mengembangkan daerah dengan kebutuhan dan prioritasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi hak, kewajiban, dan wewenang pemda dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya.

Salah satu bentuk pertanggung jawaban dari terlaksananya otonomi daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalam APBD terdapat tiga komponen yaitu Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, salah satu komponen sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. ini adalah belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintahan. Komposisi belanja daerah ini juga harus diperhatikan untuk menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah. Jika kepercayaan publik meningkat, maka dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik salah satu komponen belanja yang harus ditingkatkan adalah belanja modal.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset

tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja modal bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi penunjang terlaksana berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Peningkatan komposisi belanja modal merupakan salah satu wujud upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Namun berdasarkan data Laporan keuangan dari BPK RI menunjukkan bahwa belanja modal pada Kabupaten/Kota yang terletak disalah satu provinsi di Indonesia yaitu Sumatera Selatan masih lebih kecil dibandingkan dengan belanja operasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Belanja Daerah dan Klasifikasinya Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 (dalam jutaan Rupiah)**

<b>Kab/Kota di Sumatera Selatan</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>Belanja Operasi (BO)</b>	<b>Belanja Modal (BM)</b>	<b>Belanja Tak Terduga (BT)</b>	<b>% BO</b>	<b>% BM</b>	<b>% BT</b>
Banyuasin	2.003.217	1.576.995	424.906	1.315	78,72	21,21	0,06
Empat Lawang	860.204	606.683	253.146	375	70,52	29,42	0,04
Lahat	1.582.930	1.184.576	396.808	1.544	74,83	25,06	0,09
Muara enim	2.534.243	1.642.748	888.469	3.025	64,82	35,05	0,11
Musi Banyuasin	3.160.193	2.056.860	1.102.419	913	65,08	34,88	0,02
Musi Rawas	1.550.507	1.119.581	430.926	-	72,20	27,79	-
Musi Rawas Utara	920.347	525.934	394.412	-	57,14	42,85	-
Ogan ilir	1.279.232	955.997	323.235	-	74,73	25,26	-
OKI	2.369.154	1.602.076	626.423	262	67,62	26,44	0,01
OKU	1.323.715	974.723	348.992	-	73,63	26,36	-

OKU Selatan	1.166.044	784.285	381.552	206	67,26	32,72	0,01
OKU Timur	1.630.478	1.121.690	508.497	291	68,79	31,18	0,01
PALI	1.471.170	706.616	764.119	435	48,03	51,93	0,02
Lubuk Linggau	944.032	689.059	254.283	217	72,99	26,93	0,02
Pagar Alam	809.793	592.655	216.250	888	73,18	26,70	0,10
Palembang	3.965.007	2.848.515	1.115.910	581	71,84	28,14	0,01
Prabumulih	1.146.555	834.627	311.715	212	72,79	27,18	0,01
<b>Rata-rata (Avrg)</b>	<b>1.689.224</b>	<b>1.166.095</b>	<b>514.238</b>	<b>603</b>	<b>69,06</b>	<b>30,53</b>	<b>0,04</b>

Sumber: BPK-RI, (data diolah) 2021.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki rata-rata persentase belanja modal terhadap belanja daerah sebesar 30,53% dan rata-rata belanja tak terduga terhadap belanja daerah hanya sebesar 0,04% sedangkan rata-rata belanja operasi terhadap belanja daerah sebesar 69,06%. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik, dan diharapkan dengan adanya peningkatan belanja modal, maka akan menstimulasi perekonomian melalui kegiatan perekonomian yang produktif, yang dapat meningkatkan penerimaan daerah, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pengukuran keberhasilan program pembangunan, dan sebagai bahan perencanaan pembangunan yang akan datang. Salah satu ukuran capaian pembangunan tersebut adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan kondisi perekonomian regional secara makro. Angka-angka PDRB sebagai bahan perbandingan capaian pembangunan antar daerah. Semakin besar nilai PDRB suatu daerah menggambarkan tingkat perekonomian daerah tersebut semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, mencerminkan terjadi percepatan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Tabel 1.2, merupakan persentase pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2015-2019.

**Tabel 1.2**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHK 17 Kabupaten/Kota Menurut**  
**Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, 2015-2019**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2015</b> <b>(%)</b>	<b>2016</b> <b>(%)</b>	<b>2017</b> <b>(%)</b>	<b>2018</b> <b>(%)</b>	<b>2019</b> <b>(%)</b>
Banyuasin	5,56	5,89	5,05	5,14	5,22
Empat Lawang	4,50	4,54	3,71	4,23	3,62
Lahat	2,14	2,34	4,44	4,07	5,62
Muara enim	7,62	6,78	7,16	8,67	7,02
Musi Banyuasin	2,29	2,17	3,02	3,23	4,57
Musi Rawas	5,13	5,25	5,03	5,79	5,88
Musi Rawas Utara	3,34	2,70	4,65	4,22	4,16
Ogan ilir	4,43	5,13	5,14	5,26	5,16
OKI	4,81	4,47	5,11	5,01	5,14
OKU	3,05	3,96	4,06	5,00	5,64
OKU Selatan	4,54	5,19	4,51	5,16	5,07
OKU Timur	6,05	6,17	3,37	4,43	5,86
PALI	4,44	5,19	5,97	6,43	6,16
Lubuk Linggau	6,00	6,33	6,31	6,01	5,69
Pagar Alam	4,33	4,41	4,81	4,31	3,23
Palembang	5,45	5,74	6,21	6,69	5,94
Prabumulih	4,84	6,62	5,27	5,83	5,55

Sumber: BPS SUMSEL, (data diolah) 2021.

Jika membandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dengan tahun 2015, dapat dilihat bahwa posisi pertama daerah yang pertumbuhan tertinggi tidak mengalami pergeseran, yaitu tetap Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2019, Kabupaten Muara Enim tumbuh sebesar 7,02 persen, tetapi Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan dari tahun 2015, dan sempat naik pada tahun 2018

sebesar 8,67 persen. Diikuti oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berada pada urutan ke-2 dengan pertumbuhan sebesar 6,16 persen. Sementara Kota Palembang berada pada urutan ke-3 dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,94 persen, yang mana mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 0,75 persen.

Tahap selanjutnya, kebijakan pemerintah pada pembangunan ekonomi didasarkan pada potensi daerah masing-masing. Potensi suatu daerah dimiliki dengan keberadaan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Kemandirian daerah dapat dihitung melalui rasio, dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini, menunjukkan bahwa semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Tabel 1.3, merupakan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2015-2019.

**Tabel 1.3**  
**PAD Kabupaten/ Kota Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2015-2019**  
**(dalam jutaan Rupiah)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Banyuasin	96.219	104.218	125.984	140.602	200.616
Empat Lawang	27.118	22.347	68.806	32.217	41.672
Lahat	189.584	184.972	164.495	112.571	141.161
Muara enim	178.245	150.912	226.929	232.468	303.296
Musi Banyuasin	181.795	169.012	209.410	210.238	286.594
Musi Rawas	97.998	96.743	151.594	106.289	128.563
Musi Rawas Utara	29.172	32.174	57.580	30.141	37.574
Ogan ilir	42.843	109.762	95.711	55.362	86.150
OKI	110.225	108.992	222.961	235.946	195.401
OKU	98.756	87.578	172.013	156.622	145.563

OKU Selatan	38.197	35.696	89.506	42.993	57.669
OKU Timur	64.280	69.357	77.706	85.235	99.017
PALI	26.350	26.350	56.934	74.392	84.794
Lubuk Linggau	66.725	75.797	115.521	105.606	166.689
Pagar Alam	53.418	51.113	65.538	73.600	60.064
Palembang	736.926	781.413	1.091.704	953.302	1.081.114
Prabumulih	72.236	86.253	119,192	90,910	100.975

Sumber: BPK-RI, (data diolah) 2021.

Jika membandingkan PAD tahun 2019 dengan tahun 2015, dapat dilihat bahwa posisi pertama daerah yang Pendapatan Asli Daerahnya paling besar, yaitu tetap Kota Palembang. Pada tahun 2019, Kota Palembang tumbuh sebesar 1.081.114 (dalam jutaan Rupiah). Ini menunjukkan bahwa Kota Palembang mengalami kenaikan dari tahun 2015, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 953.302 (dalam jutaan Rupiah). Diikuti oleh Kabupaten Muara Enim yang berada pada urutan ke-2 dengan pendapatan Asli Daerah sebesar 303.296 (dalam jutaan Rupiah). Dan pada urutan ke-3, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 286.594 (dalam jutaan Rupiah).

Selain itu sumber penerimaan daerah selain PAD dan untuk mengatasi ketimpangan fiskal, pemerintah memberikan Dana Perimbangan. Dana tersebut bersumber dari APBN yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangannya, juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pada pemerintahan antar daerah. Tabel 1.4, merupakan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2015-2019.

**Tabel 1.4**  
**Dana Perimbangan Kabupaten/ Kota Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 (dalam jutaan Rupiah)**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Banyuasin	1.723.626	1.515.017	1.438.187	1.449.491	1.593.797
Empat Lawang	554.055	638.525	681.697	745.236	708.650

Lahat	1.045.949	1.060.149	1.211.669	1.377.663	1.609.981
Muara enim	1.530.146	1.666.514	1.749.209	1.792.510	2.155.493
Musi Banyuasin	1.250.448	2.327.685	2.284.442	2.399.445	3.103.333
Musi Rawas	1.056.225	1.324.817	1.159.387	1.330.725	1.422.659
Musi Rawas Utara	514.340	682.014	611.766	735.356	763.422
Ogan ilir	754.139	940.136	1.011.195	1.049.790	1.162.384
OKI	1.255.126	1.472.007	1.493.738	1.603.716	1.610.231
OKU	773.046	939.928	1.031.818	1.030.583	1.116.968
OKU Selatan	716.609	866.483	871.408	910.648	946.979
OKU Timur	922.913	1.183.323	1.109.643	1.170.665	1.224.659
PALI	516.462	655.635	801.951	1.022.376	914.755
Lubuk Linggau	582.390	719.715	715.153	706.155	763.615
Pagar Alam	520.026	611.992	680.367	636.317	640.693
Palembang	1.461.824	1.863.736	1.908.214	1.990.567	1.968.123
Prabumulih	581.085	735.605	674.043	738.071	861.847

Sumber: BPK-RI, (data diolah) 2021.

Jika membandingkan Dana Perimbangan tahun 2019 dengan tahun 2015, dapat dilihat bahwa posisi pertama daerah yang Dana perimbangan paling besar, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2019, Kabupaten Musi Banyuasin tumbuh sebesar 3.103.333 (dalam jutaan Rupiah). ini menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kenaikan dari tahun 2015, namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 dari tahun 2016 sebesar 2.284.442 (dalam jutaan Rupiah). Diikuti oleh Kabupaten Muara Enim yang berada pada urutan ke-2 dengan Dana Perimbangan sebesar 2.155.493 (dalam jutaan Rupiah). Sementara Kota Palembang berada pada urutan ke-3 dengan nilai Dana Perimbangan sebesar 1.968.123 (dalam jutaan Rupiah).

Komponen lainnya yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah adalah penerimaan pembiayaan salah satu nya adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk membiayai kegiatannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Menurut PP

No. 71 Tahun 2010 SiLPA merupakan adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang nanti nya dapat digunakan pada tahun berikutnya.

Menurut PP 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Permendagri 13 Tahun 2006. Pasal 137 menyebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

**Tabel 1.5**  
**SiLPA Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Tahun	SiLPA
2015	Rp1.304.262.577.973
2016	Rp525.301.999.944
2017	Rp358.916.102.613
2018	Rp691.757.295.470
2019	Rp1.814.020.762.711

*Sumber: BPK RI, (Data Diolah) 2021.*

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa SiLPA di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2015 SiLPA kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan hingga menyentuh angka Rp525.301.999.944, yang nantinya digunakan untuk tahun 2016. Pada tahun 2016 mengalami penurunan lagi dan SiLPA menjadi

Rp358.916.102.613 yang dapat digunakan pada tahun 2017, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan SiLPA menjadi Rp691.757.295.470 yang dapat digunakan pada tahun 2018, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi dan SiLPA menjadi Rp1.814.020.762.711 yang dapat digunakan pada tahun 2019. Jumlah ini sangatlah besar apabila digunakan dalam pembangunan dan pengadaan asset tetap. Seperti pembangunan infrastruktur Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang dilakukan oleh Putri Retno Aryani (2017) dan Nurmala Sari, dkk (2017) dengan hasil yang berbeda.

Hasil penelitian Putri Retno Aryani (2017) mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal.

Sedangkan penelitian Nurmala Sari, dkk (2017) mengenai Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi, menunjukkan PAD dan SiLPA berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal dan Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal.

Dengan hasil temuan penelitian yang berbeda-beda, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai PDRB, PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penulisan ini diberi judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019”**.

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal?
4. Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah agar masalah yang diteliti terfokus dan tidak meluas. Selain itu yang menjadi batasan objek penelitian penulis adalah penelitian ini menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dengan informasi yang diperoleh dari Laporan keuangan pemerintah daerah untuk periode 2015-2019. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dengan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Dalam pembahasan analisis penelitian penulis menggunakan aplikasi spss versi 26

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi secara parsial terhadap belanja modal.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Modal.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara parsial terhadap Belanja Modal.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi penulis  
Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dalam bidang akuntansi khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan SiLPA terhadap belanja modal.
2. Bagi Pemerintah  
Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang, sehubungan dengan belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Bagi Almamater  
Bagi Almamater hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perguruan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan belanja modal.

